



LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (L K I P) TAHUN 2020



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111, Telepon / fax : (0380) 8430046,

Email: kepegawaian@bkd.nttprov.go.id Web Site: www.bkd.nttprov.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 merupakan pertanggung jawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini juga dapat digunakan sebagai alat kendali untuk menilai kinerja pimpinan secara kuantitatif serta mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing- masing instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata Revisi atas LKIP.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun LKIP sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2018- 2023 , Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sasaran strategis terdiri dari 4 sasaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan pokok dari keempat bidang yang ada.

Dari hasil perhitungan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 terhadap pencapaian target indicator kinerja RPJMD 2018-2023 maka diperoleh persentase capaian yang diperoleh rata-rata sebesar **96.00 %** dan Masuk katagori **SANGAT BERHASIL** jika dibandingkan dengan capaian 2019 sebesar 95.94% dengan selisih kenaikan ditahun ini sebesar 0.06%. Sedangkan dalam penyerapan anggaran baik itu untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung capaian realisasi di tahun 2020 mencapai **91.43 %** dari Total DPPA sebesar **Rp. 18.415.436.200,-**. Hal ini berarti ada terjadi peningkatan capaian realisasi anggaran jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 90.22 %, dengan demikian maka terdapat selisih kenaikan sebesar 1.21% dengan total anggaran sebesar Rp. 21.217.768.000,-

Setiap pelaksanaan kegiatan dan implemementasi kebijakan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi kendala adanya perubahan aturan sehingga

mewajibkan adanya penyesuaian di tingkat Provinsi baik dari segi pemahaman akan berbagai regulasi dan tuntutan kebutuhan, Kualitas SDM , Sarana dan Prasana serta anggaran yang memadai untuk mendukung kinerja BKD Provinsi NTT dalam mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, kondisi ini tentu juga berpengaruh terhadap mitra kerja Pemerintah Provinsi NTT dengan pemerintah Kab/ Kota sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang tentunya sangat berdampak pada berbagai aspek dan kepentingan. Berbagai koordinasi dan kerja sama perlu ditingkatkan lagi agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kinerja BKD Provinsi NTT.

Adapun sistem penulisan LKIP sebagai berikut: Bab. I. Pendahuluan, Bab II. Perencanaan Kinerja, Bab III. Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari (A) Capaian Kinerja Organisasi, (B). Realisasi Anggaran dan Bab IV. Penutup. Di sertakan juga lampiran pendukung berupa (1). Perjanjian Kinerja dan (2) Lain-lain yang dianggap perlu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanNya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020. Hal ini merupakan tahun kedua penyusunan sejak ditetapkannya RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 2018- 2023, yang menjabarkan target dan realisasi pencapaian RPJMD dan RESNTRA.

Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dan disusun sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Isi dari LKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional organisasi dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah merupakan media pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu mewujudkan *Pemerintahan bersih* dan *Pemerintahan baik*. Meski demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih baik maupun dalam penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Kupang, 15 Januari 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



[Handwritten Signature]
HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M. SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197107071997032008

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Tugas dan Fungsi.....	3
1.4. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai	5
1.5. Dasar Hukum Penyusunan LKIP.....	6
1.6. Sistematika Penulisan	7

BAB II: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Rencana Strategis 2018-2023	9
2.2. Rencana Strategis Tahun 2020	11
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	23

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja Sasaran	26
3.2. Akuntabilitas Keuangan	50
3.3. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan APBD tahun 2020	51

BAB IV PENUTUP

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja	57
4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran serta Langkah Antisipatif ...	57
4.3 Strategi Pemecahan Masalah	59

LAMPIRAN – LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja 2020	
2. Rencana Kinerja 2020	
3. Rencana Aksi 2020	
4. Foto Pelaksanaan Kegiatan 2020	
5. Alamat Website dan Media Sosial BKD Provinsi NTT	

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam mendukung hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sesuai regulasi (*legitimate*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *publicgood* and *services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “ *good governance* ” (kepemerintahan yang baik). Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber

daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Badan kepegawaian Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKIP Tahun 2020 berdasarkan pada indikator (*inputs, Outputs, dan Outcomes*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Gubernur kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2020.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dan disampaikan dengan maksud untuk memberikan informasi tentang capaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur dan segenap *stakeholders* Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan program kerja selama tahun 2020.

Selain itu laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah :

- a) Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak pemberi mandat/amanat;
- b) Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan;
- c) Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan menengah.

1.3. Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

a. Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2019, tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Bab II pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa ;

"Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pembinaan KORPRI yang menjadi kewenangan Daerah".

b. Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

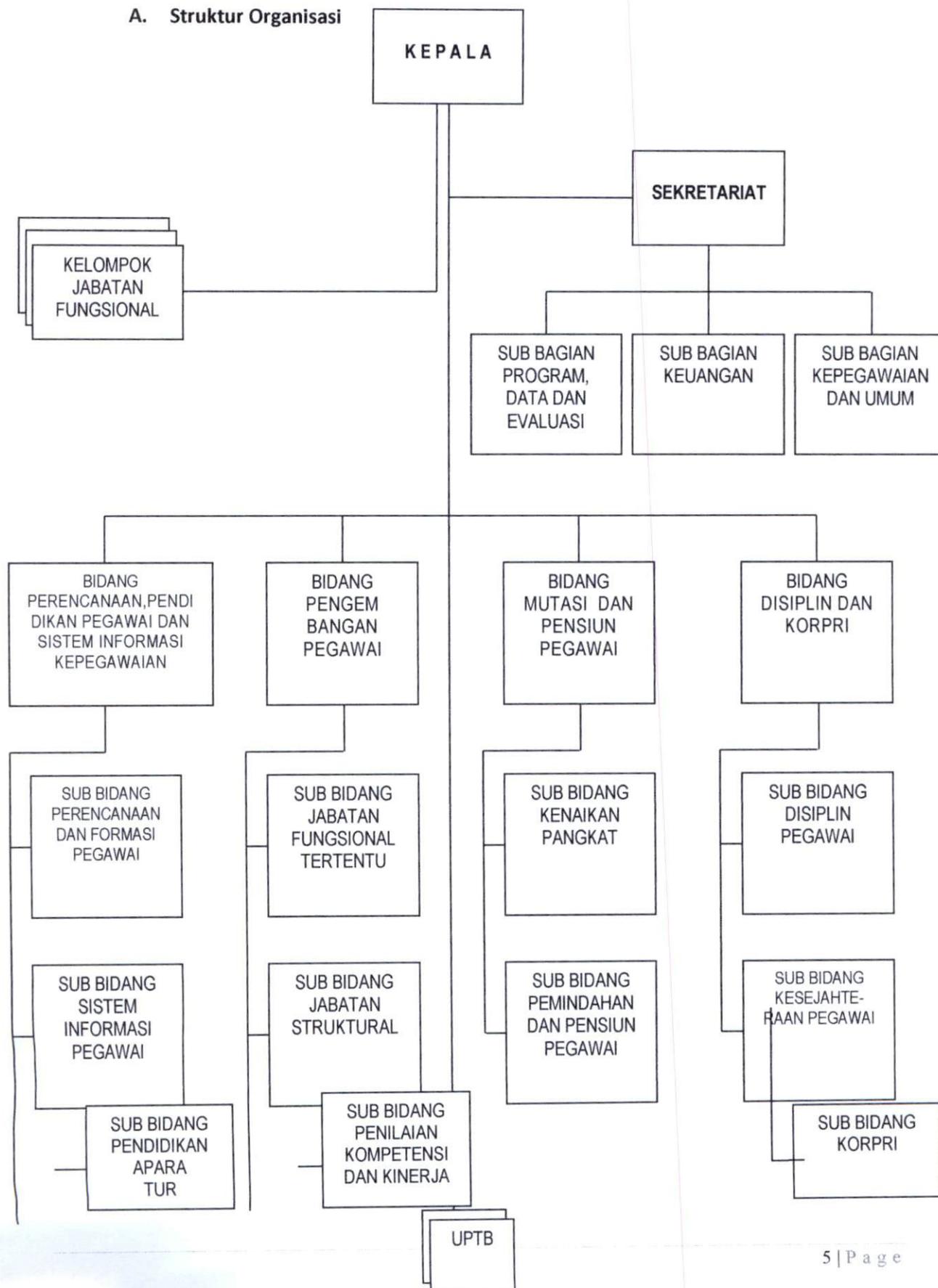
Selain itu, Dalam Bab IV pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan KORPRI yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. Penyusunan Kebijakan teknis di bidang Kepegawaian Daerah dan pembinaan KORPRI;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian Daerah dan KORPRI;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian Daerah dan Pembinaan KORPRI;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian daerah dan Pembinaan KORPRI;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing- masing.

1.4. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai

A. Struktur Organisasi



B. Jumlah Pegawai

Sumber daya manusia aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah kondisi akhir bulan Desember 2020 adalah sebanyak 97 orang yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	JABATAN	JUMLAH	TINGKATAN (eselon/ jenjang)	Ket
1.	Kepala Badan	1 orang	II-a	Ada
2.	Sekretaris	1 orang	III-a	Ada
3.	Kepala Bidang	4 orang	III-a	Ada
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	14 orang	IV-a	Ada
5.	Fungsional Arsiparis	1 orang	--	Ada
6.	Fungsional Analisis Kepegawaian Penyelia	4 orang	--	Ada
7.	Fungsional Analisis Kepegawaian Muda	1 orang	--	Ada
8.	Fungsional Analisis Kepegawaian Pertama	1 orang	--	Ada
9.	Fungsional Pranata Komputer	1 orang	--	Ada
10.	Fungsional Assessor SDMA Muda	1 orang	--	Ada
	Fungsional Assessor SDMA Pertama	3 Orang		
11.	Fungsional Umum	65 orang		
TOTAL PNS			97 orang	

1.5. Dasar Hukum Penyusunan LKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai kewajiban untuk berakuntabilitas kepada publik. Landasan hukum tersebut diantaranya:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI nomor 53 tahun 2014;
- d) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 889/75.a/BKD/PDE/2019, tanggal 20 Maret 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- f) Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan laporan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 tahun 2019.

1.6. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 terdiri dari;

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Tugas dan Fungsi
- 1.4. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai
- 1.5. Dasar Pelaksanaan
- 1.6. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- 2.1. Rencana Strategis 2018-2023
- 2.2. Rencana Strategis Tahun 2020
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Pengukuran Kinerja Sasaran
- 3.2. Akuntabilitas Keuangan
- 3.3. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan APBD tahun 2020

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja
- 4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran serta Langkah Antisipatif
- 4.3 Strategi Pemecahan Masalah

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja 2020
2. Rencana Kinerja 2020
3. Rencana Aksi 2020
4. Foto Pelaksanaan Kegiatan
5. Alamat Website dan Media Sosial BKD Provinsi NTT

BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem NKRI. Dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

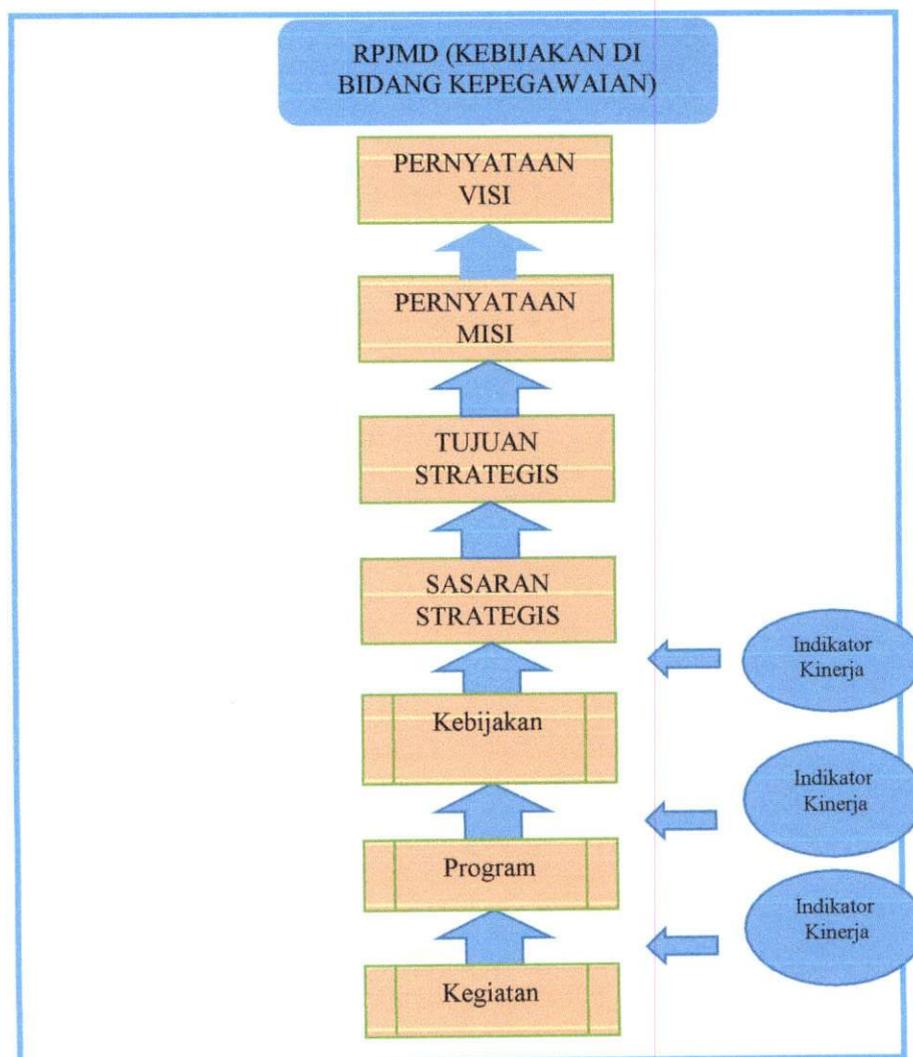
2.1 RENSTRA 2018 - 2023

Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perumusan Rencana Strategis (Renstra) tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal (kualitatif) sampai dengan yang paling teknis (kuantitatif). Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang saling terkait dalam mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi. Model Perumusan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti pola alur pikir sebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dengan semangat "**NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**", serta mewujudkan Misi ke 5 (Lima) yaitu; 'mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik' yang dijabarkan sebagai berikut yaitu : Mewujudkan optimalisasi penerapan sistem Manajemen ASN;

TABEL PENJABARAN RPJMD DAN RENSTRA TAHUN 2018- 2023



2.1.1 Tujuan

- a. Menyediakan dan menempatkan sumber daya aparatur daerah sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
- b. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.
- c. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi kepegawaian berbasis teknologi.
- d. Mewujudkan disiplin aparatur pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.

2.1.2 Sasaran

- a. Terwujudnya perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi;
- b. Terwujudnya Pengembangan Pegawai;
- c. Terwujudnya Proses Administrasi Mutasi dan Pensiun;
- d. Terwujudnya Peningkatan Disiplin, Kesejahteraan dan fasilitas KORPRI

2.2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 yang telah ditetapkan/ termuat dalam RENSTRA. Agar pencapaian terhadap masing-masing sasaran meningkat maka harus melaksanakan program dan kegiatan- keguatan yang tertera dalam RENSTRA secara tepat .Berikut ini adalah rincian Kegiatan dalam Rencana strategis BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

TABEL RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	Bidang/sub bidang	PRORAM DAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		
								TAHUN 2020		KONDISI AKHIR
								TARGET	Rp	
1	Terwujudnya Manajemen ASN Provinsi NTT yang Profesional	Perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi Pegawai	Perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi Pegawai	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI		Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi				
			Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Pegawai	Seleksi Calon PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Penyusunan Kebutuhan ASN		Terlaksananya Proses penerimaan CPNS, PPPK dan Formasi ASN	8745	1.320	977.397.775	53,383
				Seleksi CAPRA IPDN		Terlaksananya proses seleksi calon praja IPDN dan sekolah kedinasan	1200	1320	377.668.825	7,325
				Sumpah Janji PNS		Terlaksananya kegiatan sumpah janji PNS	360	676	154.965.000	3,494

NO	TUJUAN	SASARAN	Bidang/sub bidang	PRORAM DAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		
								TAHUN 2020		KONDISI AKHIR
								TARGET	Rp	
			Sub Bidang Pendidikan Aparatur	Seleksi PNS Tubel/Ibel		Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang sedang tugas belajar dan penerima beasiswa dari pihak ketiga	38	49	2.600.680.300	290
				Ujian Dinas		Tersedianya sertifikat kelulusan bagi peserta yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	600	600	322.614.025	3,661
				Monitoring dan Evaluasi terpadu		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN, PNS Tubel/Ibel asal Pemprov NTT dan Kinerja	22	-	-	22

NO	TUJUAN	SASARAN	Bidang/sub bidang	PRORAM DAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		
								TAHUN 2019		KONDISI AKHIR
								TARGET	Rp	
2		Proses Administrasi Mutasi Pegawai dan Pensiun Pegawai	Sub Bidang Sistem Informasi Pegawai	Pemuktahiran Data PNS		tersedianya sistem informasi pegawai yang mudah diakses serta memuat seluruh informasi dan data ASN secara lengkap	1252	3.399	455.830.600	14,567
				Rapat Koordinasi Bidang Kepegawain		Terlaksananya Rakor bidang kepegawain	1	1	291.243.275	1
			Proses Administrasi Mutasi Pegawai dan Pensiun Pegawai							
			Sub Bidang Kenaikan Pangkat	Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat		Terlaksananya proses penyelesaian administrasi kenaikan pangkat PNS provinsi NTT dan PNS kab/ Kota se-NTT yang menjadi kewenangan Provinsi	5250	5512	819.975.475	29,004

NO	TUJUAN	SASARAN	Bidang/sub bidang	PRORAM DAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
								TAHUN 2020		KONDISI AKHIR	
								TARGET	Rp		
			Sub Bidang Pindah dan Pensiun Pegawai	Proses Penyelesaian administrasi Pensiun		Tersedianya SK Pensiun PNS	450	528	291.652.250	2,565	
				Penyelesaian proses penempatan PNS		Penempatan PNS provinsi Kab/ Kota se- NTT yang menjadi kewenangan provinsi dan alih status PNS	1500	1.650	345.955.575	8,856	
3		Peningkatan Disiplin, Kesejahteraan ASN dan Fasilitasi KORPRI	Peningkatan Disiplin, Kesejahteraan ASN dan Fasilitasi KORPRI								
			Sub Bidang Disiplin	Proses Penanganan PNS Bermasalah		Pelaksanaan proses penanganan PNS yang bermasalah	50	30	26.514.125	38	
			Sub Bidang Kesejahteraan PNS	Rapat Dewan Kepegawaian		terlaksananya rapat dewan pertimbangan kepegawaian	4	3	54.111.125	20	
				Evaluasi kehadiran PNS		terlaksananya persentasi hasil evaluasi kehadiran PNS	4	-	-	20	

NO	TUJUAN	SASARAN	Bidang/sub bidang	PRORAM DAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		
								TAHUN 2020		KONDISI AKHIR
								TARGET	Rp	
				Bimtek pembentukan Karakter		Terlaksananya kegiatan bimtek pembentukan karakter melalui camp revolusi mental/ camp pemimpin unggul	3200	-	-	16,000
				Penyelesaian administrasi Karis Karsu		Terlaksananya proses penyelesaian administrasi kartu suami dan kartu istri	300	300	24.403.125	1,830
				Penyelesaian administrasi rekomendasi CTLN		Terlaksananya penyelesaian proses administrasi rekomendasi cuti di luar tanggungan negara	6	6	20.238.350	30

NO	TUJUAN	SASARAN	Bidang/sub bidang	PRORAM DAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		
								TAHUN 2020		KONDISI AKHIR
								TARGET	Rp	
				Pemberian Penghargaan SLKS dan Purna Bhakti		Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan SLKS X, XX, XXX Tahun dan pemberian penghargaan bagi PNS yang telah memasuki purna Tugas / Purna Bhakti	900	1200	111.962.050	5,495
				Rekonsiliasi setoran Taperum		Tersebarluasnya informasi pemanfaatan tabungan perumahan bagi PNS	2	2	32.425.375	10
			Sub Bidang KORPRI	Penguatan Kinerja Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur		Terlaksananya Musyawarah Provinsi dan Penguatan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	1	1	95.311.500	1

NO	TUJUAN	SASARAN	Bidang/sub bidang	PRORAM DAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		
								TAHUN 2020		KONDISI AKHIR
								TARGET	Rp	
				Pembinaan Rohani		Terlaksananya Pembinaan Rohani Gabungan Anggota KORPRI	12	12	87.965.650	60
				Updating Data dan Validasi data Anggota KORPRI		Terlaksananya Updating Data dan Validasi Data Anggota KORPRI se-NTT	1	-	-	5
				Fasilitasi Penyediaan Paduan Suara Anggota KORPRI		Terbentuknya Paduan Suara KORPRI Pemerintah Provinsi NTT	22	22	102.060.000	110

NO	TUJUAN	SASARAN	Bidang/sub bidang	PRORAM DAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		
								TAHUN 2020		KONDISI AKHIR
								TARGET	Rp	
				Kemitraan Penyelenggaraan HUT KORPRI Prov. NTT		Terlaksananya Penyelenggaraan HUT KORPRI Tingkat Prov. NTT	1	1	96.501.950	5
				Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum		Terlaksananya Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI melalui LKBH KORPRI	5	5	101.720.700	25
				Bimtek Kewirausahaan Bagi Anggota KORPRI yang memasuki Masa Persiapan Pensiun		Terlaksananya BIMTEK Kewirausahaan bagi PNS Anggota KORPRI yang akan memasuki masa persiapan pension	2	2	109.263.525	10
				Pekan Olahraga, Seni dan Budaya Tingkat Provinsi NTT		Terlaksananya Pekan Olahraga, Seni dan Budaya Tingkat Provinsi	1	-	-	5

NO	TUJUAN	SASARAN	Bidang/sub bidang	PRORAM DAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		
								TAHUN 2020		KONDISI AKHIR
								TARGET	Rp	
Pengembangan ASN										
4		Pengembangan ASN	Sub Bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja Pegawai	Pendampingan dan Pelatihan Aplikasi SKP Online bagi ASN pad UTD SMA/SMK/SLB lingkup Pemprov. NTT di Kota/Kab		Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Pelatihan Aplikasi SKP Online bagi ASN pad UTD SMA/SMK/SLB lingkup Pemprov. NTT di Kota/Kab	1	38	19.000.000	1
			Sub Bidang Jabatan Fungsional Tertentu	Pelantikan Pejabat Fungsional		Terlaksananya Pelantikan Bagi Pejabat Fungsional yang baru diangkat dan yang mengalami penyesuaian/peningkatan jabatan	500	600	199.502.775	2,500
				Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Fungsional Tertentu		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap pejabat Fungsional	22	9097	45.759.550	1

NO	TUJUAN	SASARAN	Bidang/sub bidang	PRORAM DAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		
								TAHUN 2020		KONDISI AKHIR
								TARGET	Rp	
				Pendidikan, Penjurangan dan Peningkatan Kompetensi PNS		Terlaksananya Kegiatan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru SMA/SMK	40	50	114.876.350	240
				Pendidikan, Penjurangan dan Peningkatan Kompetensi PNS		Terlaksananya Bimtek Penghitungan Angka Kredit	30	-	-	3,000
						Terlaksananya Lelang Jabatan Terbuka dan Akuntabel untuk eselon 4,3,2 dan 1 lingkup Provinsi				

NO	TUJUAN	SASARAN	Bidang/sub bidang	PRORAM DAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN		
								TAHUN 2020		KONDISI AKHIR
								TARGET	Rp	
			Pengembangan ASN							
			Sub Bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja Pegawai	Uji Kompetensi SDM Aparatur		Terlaksananya Uji Kompetensi bagi Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana	600	120	347.366.700	1,080
				Pengembangan Assesment Center		Terlaksananya Assesment Center	1	-	-	5
			Sub Bidang Jabatan Struktural	Pengembangan ASN		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan karir dan peningkatan Pendidikan Penjurangan	22	22	1.037.237.100	22
						Pengiriman Peserta Diklat PIM Tingkat II	-	2	60.522.000	2
						Terlaksananya/Lelang Terbuka, Pemetaan dan Pelantikan pejabat	4	3	1.554.074.700	1

Sumber: Renstra Badan Kepegawaiana Daerah Provinsi NTT Tahun 2019- 2023

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan sepakati antara pihak yang menerima amanah/ pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang menerima amanah /tugas dan tanggung jawab kinerja dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Gambaran mengenai sejauhmana keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2020. Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas agar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan, sehingga perlu ditetapkan aktifitas-aktifitas yang harus dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun aktifitas / kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD dapat diuraikan melalui matriks sebagaimana terlampir.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			KONDISI AWAL	2020			
1	Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	30%	100%	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Menciptakan Birokrasi yang Profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
		Terlaksananya lelang jabatan Terbuka dan Akuntabel untuk eselon 4,3,2 dan 1 lingkup Provinsi	50%	100%			

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 806.974.550
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 875.839.600
3.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 20.000.000
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian	Rp. 7.679.776.050
	Jumlah	Rp. 9.382.590.200

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018- 2023 yang pelaksanaan pencapaiannya termuat dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) .

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dalam Renstra dan Penetapan Kinerja, maka dilakukan pengukuran capaian kinerja dan metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja:

3.1. PENGUKURAN KINERJA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Di tahun 2020, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk menjawab tuntutan pemerintah pusat dan daerah ataupun untuk menjawab kebutuhan pelayanan kepada masyarakat se Nusa Tenggara Timur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di di daerah, telah menetapkan Visi dan misi untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam RPJMD 2018- 2023.

Dalam RPJMD Provinsi NTT yang telah ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengemban misi strategis ke Lima yaitu; mewujudkan Reformasi Birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di dalamnya termuat 1 (satu) sasaran strategis yaitu: Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif. Untuk menjawab sasaran strategis dan Indikator pada RPJMD maka Badan Kepegawaian menetapkan Sub Sasaran strategis yaitu; pembinaan dan pengembangan kepegawaian dan Sub Indikator- sub indikator agar setiap program dan kegiatan BKD dapat lebih jelas dan mudah . Cara melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi yang dapat jelaskan sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Atau:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Sedangkan metode penyimpulan Capaian sasaran dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Nilai Angka	Kategori Capaian (Interprestasi)
1	$X \geq 85\%$	Sangat Berhasil
2	$75\% \leq X < 85\%$	Berhasil
3	$55\% \leq X < 75\%$	Cukup Berhasil
4	$X < 55\%$	Belum Berhasil

Dalam dokumen resmi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, termuat 1 (satu) sasaran inti yang diemban oleh Badan kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengemban visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran tersebut yaitu; pembinaan dan pengembangan Kepegawaian. Dari sasaran ini telah dijabarkan 2 (dua) indicator kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian terhadap pencapaian RPJMD, adapun indicator tersebut yaitu (1). Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi; dan (2). Terlaksananya lelang jabatan terbuka akuntabel untuk eselon 4,3,2 dan 1 lingkup Provinsi NTT.

Selanjutnya untuk menjabarkan sasaran program dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka disusunlah RENSTRA (Rencana Strategis) Badan Kepegawaian Daerah yang memuat sasaran- sasaran kecil berdasarkan bidang- bidang teknis pengelola kegiatan pada unit kerja tersebut serta merincikan berbagai kegiatan-kegiatan untuk menjawab sasaran-sasaran tersebut ataupun bahkan menjawab sasaran di RPJMD.

Berikut adalah sasaran-sasaran pada RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus merupakan nama Kegiatan besar pada masing-masing bidang, antara lain:

1. Perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi
2. Pengembangan Pegawai
3. Mutasi pegawai dan Pensiun Pegawai
4. Peningkatan Disiplin dan KORPRI

Berdasarkan RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 dan RENSTRA BKD Provinsi NTT, maka berikut dapat dijelaskan beberapa indikator yang menjadi acuan tercapainya sasaran Inti dan Sasaran-sasaran pendukung yang dapat dipaparkan dalam table sebagai berikut:

A. SASARAN STRATEGIS PADA RPJMD 2018-2023;

SASARAN RPJMD	Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian
----------------------	---

Secara garis besar sesuai dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023, Badan Kepegawaian hanya memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sesuai dengan Misi ke- 5 (lima) yaitu mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah capaian untuk Indikator pertama sesuai dengan RPPJMD.

INDIKATOR I	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi
--------------------	---

Berdasarkan nama indikator pertama, maka dapat ditentukan sub-sub indikator yang dapat menunjang pencapaiannya pada sasaran ini. Bahwa dari berbagai kegiatan dan sub-sub kegiatan yang telah dilakukan, hanya terdapat 3 (tiga) kegiatan/ sub kegiatan yang disiapkan sebelum seseorang menduduki suatu jabatan baik itu formasi PNS;

NO	Indikator Program	Kegiatan	Kegiatan/ Indikator Output	Satuan	Data Dasar 2019	2020			RPJMD	
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian 2020
A	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	Perencanaan, pendirian dan sistem informasi		orang	86.84	553	468	92.00	100	92.00
1			Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);	Orang	93.43	507	422	83.23	100	83.23
2			Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);	Orang	73.45	0	0	0	0	0
3			Seleksi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (CAPRA IPDN);	Orang	81.33	46	46	100	100	100
RATA- RATA								92.00	100	92.00

Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian terhadap indikator I RPJMD sebesar 92.00 % dari target 100 % yang ditetapkan. Capaian ini lebih besarnya 0.12 % dibandingkan dengancapaian di tahun 2019, yang disebabkan karena factor kelulusan merupakan suatu hal yang tidak bisa diprediksi secara pasti mengingat system yang serba

kompetitif serta standar kelulusan yang sangat tinggi sehingga banyak peserta tes yang mengalami kegagalan dalam mengisi formasi yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Kegiatan CPNS ini juga merupakan capaian lanjutan dari CPNS Formasi 2019. Sedangkan untuk pengadaan seleksi di tahun 2020 ditiadakan sebagai akibat dari adanya realokasi anggaran serta tidak ada petunjuk teknis pelaksanaan dari Pemerintah Pusat.

INDIKATOR II	Terlaksananya lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 4,3,2 dan 1 lingkup Provinsi
---------------------	---

Selain indikator diatas, berikut adalah pencapaian terhadap indikator kedua dari sasaran RPJMD Provinsi NTT. Indikator kedua lebih micro dan terperinci indikator pencapaiannya.

NO	Indikator Program	Kegiatan	Kegiatan/ Indikator Output	Satuan	Data Dasar 2019	2020			RPJMD	
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian 2020
B	Terlaksananya lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 4,3,2, dan 1 lingkup provinsi	Pembangan Pegawai	Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama	orang	100	7	7	100	100	100
1			Eselon 4	Orang	0	0	0	0	100	0
2			Eselon 3	Orang	0	0	0	0	100	0
3			Eselon 2	Orang	100	7	7	100	100	100
4			Eselon 1	<i>Telah dilaksanakan pada tahun 2017</i>						
RATA- RATA								100	100	100

Berdasarkan hasil tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa capaian terhadap indikator II di RPJMD sebesar 100 % sesuai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan dari pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi dimana terdapat 7 jabatan yang lowong, dan telah dilakukan kegiatan seleksi terbuka untuk mengisi 7 jabatan lowong tersebut sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan. Namun pada saat penetapan dan pelantikan hanya 6 jabatan saja yang dilantik untuk mengisi jabatan lowong tersebut. Sedangkan untuk 1 jabatan yang lowong berdasarkan berbagai pertimbangan yang ada, Gubernur selaku PPK setelah melakukan pendalaman terhadap rekam jejak kinerja dan bukti terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari masing-masing calon dipandang kurang cakap untuk dilantik dalam jabatan tersebut mengingat besarnya tanggung jawab karena instansi tersebut menjadi salah satu sector unggulan dalam mewujudkan visi NTT bangkit NTT sejahtera.

Dengan demikian maka total pencapaian kinerja terhadap Indikator yang ditetapkan di RPJMD 2018-2023 di tahun 2020 hanya sebesar 96.00 %. Jika dibandingkan dengan pencapaian indikator RPJMD di tahun 2019 sebesar 95.94 % maka telah terjadi peningkatan realisasi sebesar 0.06 % .

B. SASARAN PADA RENSTRA BKD PROVISI NTT 2018-2023;

SASARAN I	Perencanaan, Pendidikan, dan Sistem Informasi
------------------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat (umum ataupun ASN) guna memperoleh kesempatan dalam mengisi formasi CPNS sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi, peningkatan kapasitas diri melalui jalur pendidikan dan mengikuti perkembangan informasi/ data di bidang kepegawaian secara cepat, tepat dan transparan. Dalam mewujudkan sasaran tersebut berikut ini merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing- masing sub bidang pada Bidang Perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi yang didukung dengan anggaran APBD yang tertuang dalam DPPA BKD Provinsi NTT tahun 2020 sebesar **Rp. 3.910.398.200**

TABEL I

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN I :

NO	Indikator Program	Kegiatan	Kegiatan/ Indikator Output	Satuan	Data Dasar 2019	2020			RPJMD	
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian 2020
1	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	Perencanaan, Pendidikan dan sistem informasi	Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);	Orang	93.43	507	422	83.23	100	83.23
2			Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);	Orang	73.45	0	0	0	0	0
3			Seleksi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (CAPRA IPDN);	Orang	81.33	46	46	100	100	100
4			Pelaksanaan Sumpah Janji PNS	Orang	49.78	1.058	1.058	100	100	100
5			Monitoring dan evaluasi terpadu terhadap Praja IPDN, PNS Tubel dan Ibel asal Pemerintah Provinsi NTT	kali	100	0	0	0	0	0

6			Seleksi Tugas Belajar (Tubel)	Orang	100	0	0	0	0	0
7			Ujian Dinas/ Penyesuaian Ijasah;	Orang	71.73	660	519	78.63	100	78.63
8			Pemutakhiran Data PNS	Data	3.361	3.399	8.193	241.04	100	241.04
RATA – RATA								120.58	100	120.58

Pencapaian masing-masing indikator pada sasaran pertam dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Pelaksanaan Seleksi CPNS Formasi 2019 telah dilaksanakan secara bertahap dari seleksi administrasi di tahun 2019 dan seleksi SKD dan SKB pada tahun 2020. Berdasarkan formasi CPNS sebanyak 507 jabatan, telah terealisasi / dinyatakan lulus sebanyak 422 jabatan. sehingga capaian pada kegiatan ini 100%. Dari formasi yang terisi tersebut 1 orang PNS yang dinyatakan lulus meninggal dunia dan sebanyak 421 orang PNS yang diangkat menjadi CPNS Provinsi NTT.

Dengan demikian maka Realisasi mencapai target **100 %**. Jika dibandingkan dengan hasil seleksi CPNS tahun 2018 sebesar 94,71 %, maka terjadi peningkatan hasil seleksi sebesar 5.29 %. Hal ini disebabkan oleh beberap factor antara lain; (1. Gencarnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT melakukan kegiatan sosialisasi, simulasi dan berbagi informasi atau pengalaman terkait seleksi di sekolah-sekolah dan (2).). Proses seleksi

yang sangat ketat sehingga peserta seleksi semakin kompetitif dalam melakukan persiapan mandiri.

2. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Ditahun 2020, Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditiadakan karena tidak ada petunjuk teknis pelaksanaan dari pemerintah pusat. Sedangkan Realisasi jumlah PPPK di tahun 2019 sebesar 83 orang atau mencapai 73.45 % dari target yang ditetapkan 100%. Dengan demikian maka pencapaian terhadap RPJMD sebesar 73.45 %.

3. Seleksi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (CAPRA IPDN);

Formasi Calon Praja IPDN ditahun 2020 sebesar 46 orang dan yang dinyatakan lulus sebesar 46 orang, sehingga capaian pada kegiatan ini mencapai **100%**. Namun terdapat 1 orang peserta seleksi yang dinyatakan lulus mengundurkan diri yang menyebabkan formasi terisi hanya sebanyak 45 orang. Berdasarkan capaian untuk kegiatan ini ditahun 2020 sebesar 100 % jika dibandingkan dengan Realisasi jumlah Capra IPDN ditahun 2019 sebesar 93.75% maka ada kenaikan sebesar 6.25%. Peningkatan capaian tahun 2020 dikarenakan beberapa factor antara lain: (1). Tingginya minat para pelajar untuk mengikuti SPCP IPDN (2). Dukungan yang kuat dari SMA di kab/ kota se-NTT dalam mendukung kegiatan sosialisasi SPCP IPDN, (3). Tersedianya purna praja yang dapat membagikan informasi dan pengalaman dll.

4. Pelaksanaan Sumpah Janji PNS;

Dengan adanya pandemic Covid 19 di tahun 2020, pelaksanaan kegiatan sumpah janji dilaksanakan secara virtual dengan target sebesar 1.058 PNS dan telah direalisasi sebesar 1.058 PNS. Dengan demikian maka pencapaian sebesar **100 %**. Ditahun 2019, realisasi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengikuti sumpah janji hanya mencapai 29.42% yang artinya terjadi lonjakan kenaikan sebesar 70.58 %.

5. Monitoring dan evaluasi terpadu terhadap Praja IPDN, PNS Tubel dan lbel asal Pemerintah Provinsi NTT;

Penyelenggaraan kegiatan ini ditiadakan di tahun 2020 sesuai dengan penetapan dokumen rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT 2018-2023.

6. **Seleksi Tugas Belajar (Tubel);**

Anggaran semula yang dialokasikan untuk penyelenggaraan seleksi tugas belajar bagi PNS Provinsi NTT di tahun 2020 dialihkan untuk penanganan Covid 19. Sedangkan pencapaian tahun 2019 realisasinya mencapai 90.47 %.

7. **Ujian Dinas/ Penyesuaian Ijasah;**

Tahun 2020, target pelaksanaan Ujian Dinas sebanyak 660 PNS dan yang mengikuti dan dinyatakan lulus Ujian dinas sebanyak 519 PNS. Maka capaian sebesar **78.63** %. Jika dibandingkan dengan Realisasi PNS yang mengikuti dan lulus ujian Dinas/Penyesuaian Ijasah tahun 2019 yang mencapai 45.72 % maka terjadi peningkatan capaian sebesar 33.91 % di tahun 2020.

8. **Pemutakhiran Data;**

Kegiatan pemutakhiran data PNS pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian tahun 2020 ditargetkan sebanyak 3.399 data/orang. Realisasi capaian sebanyak 8.193 data/org. Hal ini berarti terjadi lonjakan capaian sebesar **241.04** %.

Dengan demikian tingkat capaian indikator kinerja sasaran "**Perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi**" adalah sebesar **120.58** % dengan kategori "**Sangat Berhasil.**" Faktor penentu capaian melebihi target berasal dari kegiatan pemutakhiran data, sehingga mempengaruhi total capaian akhir pada sasaran ini. Jika Realisasi Sasaran I (Perencanaan, Pendidikan, dan Sistem Informasi) dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang hanya mencapai 80.37 % tentunya tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 40.21 % .

SASARAN II	Pengembangan Pegawai
-------------------	-----------------------------

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik baik dari aspek jumlah maupun kualitas sumberdaya manusia berdasarkan formasi, kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Dengan anggaran sebesar **Rp. 1.937.415.050**, maka dapat dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja II sebagai berikut:

TABEL II

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN II :

NO	Indikator Program	Kegiatan	Kegiatan/ Indikator Output	Satuan	Data Dasar 2019	2020			RPJMD		
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian 2020	
1	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	Pengembangan Pegawai	Uji Kompetensi	Orang	99.16	61	61	100	100	100	
			<i>Eselon I</i>	<i>Dilaksanakan ditahun 2017</i>							
			<i>Eselon II</i>	Orang	100	0	0	0	100	100	
			<i>Eselon III</i>	Orang	97.99	0	0	0	100	100	
			<i>Eselon IV</i>	Orang	100	0	0	0	100	100	
			<i>Pelaksana/Staf</i>	Orang	100	61	61	100	100	100	
2			Lelang Terbuka Jabatan Eselon 4,3,2 dan 1	Orang	75	7	7	100	100	100	
			<i>Eselon 4</i>	Orang	0	0	0	0	100	0	
			<i>Eselon 3</i>	Orang	0	0	0	0	100	0	
			<i>Eselon 2</i>	Orang	100	7	6	85.71	100	85.7	

										1
			<i>Eselon I</i>	<i>Dilaksanakan ditahun 2017</i>						
3			Pengiriman Peserta Diklat PIM 1,2,3, dan 4	Orang	29.59	0	0	0	0	0
			<i>Eselon I</i>	<i>Dilaksanakan ditahun 2017</i>						
			<i>Eselon II</i>	Orang	8	0	0	0	100	54
			<i>Eselon III</i>	Orang	55.98	0	0	0	100	77.99
			<i>Eselon IV</i>	Orang	24.79	0	0	0	100	62.39
4			Pelantikan Pejabat Fungsional Tertentu	Orang	352.8	53	53	100	100	100
5			Pendidikan, Penjenjangan dan Peningkatan Kompetensi	Orang	100	25	25	100	100	100
			<i>Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengembangan Metode/ Instrumen</i>	Orang	100	25	25	100	100	100

			Uji Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur							
RATA – RATA								100	100	100

Berikut ini merupakan kegiatan- kegiatan yang dilakukan untuk menjawab sasaran kedua di tahun 2019 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi SDM Aparatur ;

Tahun 2020, uji kompetensi ditargetkan hanya untuk 61 orang Pejabat Pelaksana di Lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT sebagai dampak terjadinya realokasi/ refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19. Metode yang digunakan merupakan kombinasi Assessment Center dan CAT. PNS yang mengikuti kegiatan tersebut ditargetkan sebanyak 61 PNS dan telah diikuti oleh PNS sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian mencapai 100 %. Hasil capaian tahun 2020 sama dengan tahun 2019 yaitu mencapai 100%.

2. Terlaksananya Lelang terbuka, Pemetaan dan Pelantikan Pejabat ;

Struktural (dapat juga dilihat pada Uji kompetensi diatas); Lelang terbuka melalui uji kompetensi baik itu metode CAT ataupun Assessment Center hanya dilakukan bagi pengisian jabatan eselon I dan II yang lowong ataupun untuk pemetaan kompetensi. Bagi Pejabat Struktural eselon III dan IV di lakukan uji kompetensi sebelum menduduki suatu jabatan dan usulan pesertanya berasal dari Perangkat Daerah masing-masing Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Bagi Calon yang telah memenuhi syarat untuk pengisian maka akan diusulkan untuk menduduki jabatan. Realisasi pejabat struktural yang telah mengikuti lelang terbuka dan menduduki jabatan ditahun 2020 mencapai target sebesar 100 % hasil ini sama dengan capaian di tahun 2019.

3. **Pengiriman Peserta Diklat PIM Tingkat II, III dan IV;**

Tahun 2020 pengiriman peserta Diklat PIM Tingkat II, III dan IV di tiadakan. Untuk realisasi pejabat struktural yang telah mendapat rekomendasi sebagai peserta diklat ditahun 2019 mencapai target sebesar 100 %.

4. **Pelantikan Pejabat Fungsional Tertentu**

Tahun 2020 target pelantikan bagi pejabat fungsional tertentu sebanyak 53 orang dan telah direalisasikan sesuai target yang ditetapkan sehingga capaian menjadi **100 %**. Jika dibandingkan dengan realisasi pejabat fungsional tertentu yang telah dilantik ditahun 2019 sebesar 352.8 % yang melampaui target yang ditetapkan hanya 100% tentu terjadi penurunan yang sangat signifikan akibat dari pandemic covid 19 yang mempengaruhi pada pelaksanaan kegiatan birokrasi secara menyeluruh.

5. **Penjenjangan dan Peningkatan Kompetensi (Bimtek PAK)**

Tahun 2020 kegiatan penjenjangan/ peningkatan kompetensi melalui Bimbingan teknis Pengembangan Metode/ Instrumen Uji Kompetensi bagi jabatan Assessor SDM Aparatur dengan target 25 PNS dan direalisasikan sesuai dengan yang ditetapkan , maka hasil capaian menjadi **100 %**. Hasil capaian ini sama seperti pada kegiatan Bimbingan teknis Realisasi pejabat Fungsional tertentu yang telah mengikuti kegiatan Penjenjangan/ peningkatan kompetensi melalui Bimtek PAK ditahun 2019 mencapai target sebesar 100 % .

Dengan demikian tingkat capaian indikator kinerja sasaran "**Pengembangan Pegawai**" adalah sebesar **100 %** dengan kategori "**Sangat Berhasil.**" Jika dibandingkan capaian ditahun 2019 yang mencapai 150.56%, maka terjadi penurunan selisih sebesar 50.56 % dikarenakan oleh Faktor covid -19 sehingga mata anggaran yang menunjang terlaksananya kegiatan mengalami realokasi/ refokusing untuk penanganan pandemic tersebut.

Sasaran ini diarahkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap PNS dalam pengurusan administrasi kenaikan pangkat, berkala, pengurusan karpeg juga dalam pemberian gaji yang adil dan layak yang berdasarkan pangkat, maupun PNS yang akan purna bhakti dalam pemberian gaji yang adil dan layak yang berdasarkan pada beban kerja, resiko dan tanggung jawab. Setiap PNS akan digaji berdasarkan pangkat, jabatan dan kinerja sesuai capaiannya. Sedangkan untuk indikator proses bahan pensiun pegawai diarahkan untuk penyelesaian proses administrasi pensiun PNS baik BUP, 58 tahun untuk PNS dan 60 tahun sebagai PNS Pejabat Pimpinan Tinggi dan juga pensiun dini, janda/ duda. Proses usulan pindah pegawai diarahkan untuk penyelesaian proses pindah PNS masuk/ keluar Provinsi, antar kab/ kota dan yang membutuhkan rekomendasi Gubernur. Dalam Mencapai sasaran tersebut diatas, terdapat beberapa kegiatan-kegiatan telah dilakukan oleh masing- masing sub bidang pada Bidang Mutasi dan Pensiun yang disukung dengan APBD dalam DDPA BKD Provinsi NTT sebesar **Rp. 790.023.950.-** dan capaiannya sebagai berikut;

TABEL III

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN III :

NO	Indikator Program	Kegiatan	Kegiatan/ Indikator Output	Satuan	Data Dasar 2019	2020			RPJMD	
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian 2020
1		Mutasi dan pensiun pegawai	Proses Usulan Kenaikan Pangkat PNS	SK	83.89	5.512	4.453	80.78	100	80.78
2			Proses Usulan Pindah	SK	120.06	1.650	658	39.87	100	39.87

			Pegawai							
3			Proses Usulan Pensiun Pegawai	SK	110.79	528	516	97.72	100	110.79
RATA – RATA								72.79	100	72.79

Berikut ini merupakan kegiatan- kegiatan yang dilakukan untuk menjawab sasaran ketiga di tahun 2019 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Proses usulan kenaikan pangkat;**

Tahun 2020 target pengurusan kenaikan pangkat sebesar 5.512 sk dan direalisasikan sebanyak 4.453 sk yang menyebabkan capaian sebesar **80.78 %**. Kondisi capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar sebesar 79.56 % atau terdapat selisih kenaikan capaian sebesar 1.22 %. Dengan demikian maka pencapaian terhadap RPJMD sebesar 80.78 % di tahun 2020 dari target sebesar 100 % yang ditetapkan.

2. **Proses Usulan Pindah;**

Target penyelesaian proses usulan pindah sebesar 1.650 sk dan terealisasi sebanyak 658 SK. Hal ini menjadikan capaian rendah yaitu **39.87%** atau lebih rendah di bandingkan dengan tahun 2019 sebesar 143.73 % . Dengan demikian maka terdapat selisih capaian lebih rendah 103.86 % yang factor terbesarnya disebabkan adanya bencana pandemic Covid 19 sehingga tertundanya beberapa penyelesaian administrasi kepegawaian yaitu penundaaan sementara proses mutasi PNS ke Luar Instansi selama masa kedaruratan kesehatan. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap perubahan peraturan perundang-undangan terkait tata cara pelaksanaan mutasi yang diatur dalam Peraturan BKN Nomor 5 tahun 2019 sehingga proses penyelesaian mutasi perlu penyesuaian dengan aturan yang berlaku.

3. **Proses Usulan Pensiun Pegawai.**

Target penyelesaian SK pensiun di tahun 2020 sebesar 528 dan direalisasikan sebesar 516 atau mencapai **97.72 %**. Hal ini lebih rendah capaiannya jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 127.11 % Terdapat selisih turun capaian sebesar 29.39 % yang

dikarenakan proses pensiun janda/ duda dan pensiun dini tidak bisa diprediksi sebelumnya berbeda halnya dengan proses pension karena sudah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) yang sudah pasti jumlahnya.

Dengan demikian tingkat capaian indikator kinerja sasaran " **Proses Administrasi Mutasi dan Pensiun Pegawai**" adalah sebesar **72.79 %** dengan kategori "**Cukup Berhasil.**" Namun jika dibandingkan dengan capaian ditahun 2019 yang mencapai 116.80 % maka terdapat penurunan capaian realisasi sebesar 44.01 % yang disebabkan adanya bencana pandemic Covid 19 yang sehingga tertundanya beberapa penyelesaian administrasi kepegawaian yaitu penundaaan sementara proses mutasi PNS ke Luar Instansi selama masa kedaruratan kesehatan. Selain itu juga Pindah dan pensiun pegawai yang tidak bisa diprediksi secara pasti target pertahun karena disesuaikan dengan keadaan, sehingga mempengaruhi total capaian akhir pada sasaran ini.

SASARAN IV	Peningkatan Disiplin, Kesejahteraan ASN dan fasilitasi KORPRI
-------------------	--

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan disiplin ASN, peningkatan kesejahteraan , pemberian penghargaan serta pelayanan KORPRI bagi PNS dan keluarga PNS sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan aparatur terhadap masyarakat. Dalam Mencapai sasaran tersebut diatas, terdapat beberapa indikator kegiatan- kegiatan telah dilakukan oleh masing- masing sub bidang pada Bidang Disiplin dan KORPRI yang didukung dengan anggaran APBD sebesar **Rp. 995.275.850.-** sebagai berikut;

TABEL IV

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN IV :

NO	Indikator Program	Kegiatan	Kegiatan/ Indikator Output	Satuan	Data Dasar 2019	2020			RPJMD	
						Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian 2020
1			Proses Penanganan	Orang	85.34	37	62	167.56	100	167.56

			PNS bermas alah							
2			Rapat Dewan Kepega waan (RDK)	Kasus	94.11	1	1	100	100	100
3			Evaluasi Kehadir an PNS	Keg	100	0	0	0	100	0
4			Penyele saian adminis trasi CTLN	Rekom endasi	49.99	3	3	100	100	100
5			Pemberi an penghar gaan SLKS dan Purna Bhakti	Orang	100. 77	400	517	129.25	100	129.25
6			Penyele saian adminis trasi Karis/ Karsu	Orang	112	200	156	78	100	78

7			Rekonsiliasi Setoran Taperum	Keg	100	1	1	100	100	100
8			Penguatan Kinerja Dewan Pengurus KORPRI	Keg	100	1	1	100	100	100
9			Pembinaan Rohani	Kali	79.16	12	7	58.33	100	58.33
10			Updating dan Validasi Data Anggota KORPRI	Lokasi	100	0	0	0	100	0
11			Fasilitas Penyediaan Paduan Suara	Orang	100	29	29	100	100	100
12			Kemitraan Penyele	Orang	100	80	80	100	100	100

			nggaraan HUT KORPRI							
13			Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	Kasus	100	3	3	100	100	100
14			Bimtek Kewirausahaan	Orang	95	0	0	0	100	0
15			Pekan Olahraga, Seni, dan Budaya Provinsi NTT	Cabor	100	0	0	0	100	0
16			Monitoring dan evaluasi terpadu	Lokasi	100	0	0	0	100	0
RATA – RATA								103.01	100	103.01

Berikut ini uraian capaian indikator- indikator kegiatan yang dilakukan untuk menjawab sasaran kedua di tahun 2020 sebagai berikut:

1. Proses Penanganan PNS bermasalah;

Target dalam penanganan PNS bermasalah di tahun 2020 sebesar 37 dan telah direalisasikan sebanyak 62 sehingga mencapai **167.56 %**. Jika Realisasi penanganan PNS

bermasalah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 82.45 % maka terjadi peningkatan capaian sebesar 85.11 %.

2. **Rapat Dewan Kepegawaian (RDK);**

Di tahun 2020 target dilakukannya Rapat Dewan Kepegawaian (RDK) sebesar 1 kali kegiatan dan telah 1 kali kegiatan sehingga capaian menjadi **100 %**. Capaian ini jika hasilnya sama dengan yang terjadi ditahun 2019 yakni 100 %. Dengan demikian maka pencapaian terhadap RPJMD di tahun 2019 sebesar 100 % sesuai dengan target ditetapkan.

3. **Evaluasi Kehadiran PNS;**

Dampak terjadinya pandemic covid 19 mengharuskan pengalihan anggaran dan pembatasan sosial berskala besar, sehingga kegiatan Evaluasi Kehadiran PNS di tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan untuk penanganan penyebaran virus tersebut. Walaupun tupoksi lainnya terkait kegiatan ini tetap dilaksanakan namun capaian terhadap indicator tidak bisa dicapai. Hal ini berbeda jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 100 %.

4. **Penyelesaian administrasi rekomendasi CTLN;**

Target penyelesaian administrasi rekomendasi CTLN di tahun 2020 sebesar 3 dan hanya terealisasi 3, sehingga capaian hanya sebesar **100%**. kegiatan ini sifatnya yang bersifat kasuistis dan tidak dapat diprediksi, meski demikian jika capaian ini dibandingkan dengan ditahun 2019 hanya mencapai 33.33 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %, kondisi ini lebih tinggi selisih sebesar 66.67

5. **Pemberian penghargaan SLKS dan Purna Bhakti;**

Tahun 2020 pencapaian pemberian penghargaan SLKS dan purnah bhakti melebihi target yang ditetapkan yaitu 517 sedangkan target 400. Dengan demikian maka hasil capaian menjadi **129.25 %**. Jika dibandingkan dengan realisasi pemberian penghargaan SLKS dan Purna Bhakti ditahun 2019 hanya mencapai 61.84 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %, maka terdapat selisih kenaikan sebesar 67.41%

6. **Penyelesaian administrasi Karis/ Karsu;**

Target yang ditetapkan dalam rangka penyelesaian administrasi Karis/ Karsu di tahun 2020 sebesar 200 namun yang direalisasikan sebanyak 156 sehingga pencapaian hanya sebesar **78 %**. Hal ini disebabkan karena proses pengurusan yang berjalan lambat akibat adanya

pandemic covid 19 serta terbatasnya anggaran yang disediakan untuk menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum mengusulkan ke BKD Provinsi NTT. Jika dibandingkan dengan realisasi ditahun 2019 mencapai 125 % lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 100 % maka tahun ini terjadi penurunan Selisih sebesar 47 % .

7. Rekonsiliasi Setoran Taperum;

Kegiatan Rekonsiliasi Setoran taperum semula di targetkan 1 kali kegiatan dan telah direalisasikan menjadi 1 kali kegiatan sehingga capaian menjadi **100%**. Jika di bandingkan dengan realisasi pelaksanaan rekonsiliasi setoran taperum ditahun 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100 % , maka tidak ada perbedaan capaian yang terjadi.

8. Penguatan Kinerja Dewan Pengurus KORPRI;

Target kegiatan penguatan Dewan Pengurus KORPRI tahun 2020 sebanyak 1 kegiatan dan telah direalisasikan secara baik sehingga mencapai **100 %**. Capaian ini sama berhasilnya jika dibandingkan dengan tahun 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100 % .

9. Pembinaan Rohani;

Kegiatan pembinaan rohani di tahun 2020 juga terkena dampak akibat pandemic covid 19 yang menimpa dunia, sehingga target pelaksanaan yang biasa dilakukan dengan mengumpulkan masa harus ditiadakan dan diubah metode pelaksanaannya secara online. Dari target 12 kali kegiatan yang ditetapkan hanya dapat terealisasi sebanyak 7 kali kegiatan sehingga menyebabkan pencapaian hanya sebesar **58.33 %**. Jika dibandingkan dengan pencapaian pelaksanaan ditahun 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100 % , maka terjadi selisih lebih rendah sebanyak 41.67 % ditahun 2020.

10. Updating dan Validasi Data Anggota KORPRI

Kegiatan updating dan validasi data Anggota KORPRI ditahun 2020 tidak dapat dilaksanakan sebagai dampak covid 19 yang menyebabkan terjadinya realokasi/ refokusing anggaran. Disisi lain, Capaian sub kegiatan ini di tahun 2019 mencapai 100 % .

11. Fasilitasi penyediaan paduan suara;

Dalam rangka fasilitasi penyediaan paduan suara, di tahun 2020 BKD Provinsi telah menetapkan target sebesar 29 orang untuk merealisasikan dan telah tercapai 100 % . Capaian ini sama seperti ditahun 2019 yaitu mencapai 100 % .

12. **Kemitraan penyelenggaraan HUT KORPRI;**

kegiatan kemitraan penyelenggaraan HUT KORPRI ditahun 2020 dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 80 orang/ kegiatan sehingga capaian pada kegiatan ini **100%**. Hal ini sama dengan capaian di tahun 2019 yang mencapai target yang ditetapkan sebesar 100 %.

13. **Peningkatan pelayanan bantuan hukum;**

Tahun 2020, target pemberian pelayanan bantuan hukum ditetapkan sebanyak 3 kali dan telah terealisasi sebanyak 3 kali sehingga capaian sebanyak **100%**. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2019 hanya mencapai 40,00 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 % , selisih lebih tinggi sebesar 60.00 % terjadi di tahun 2020.

14. **Bimtek kewirausahaan;**

Kegiatan ini tidak dilaksanakan di tahun 2020 akibat Covid 19. Sedangkan realisasi pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) kewirausahaan ditahun 2019 hanya mencapai 90 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %.

15. **Pekan Olahraga, Seni dan Budaya Provinsi NTT;**

Kegiatan ini tidak dilaksanakan ditahun 2020 akibat covid 19. Realisasi pelaksanaan pekan olahraga, seni dan budaya Provinsi NTT ditahun 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100 % .

16. **Monitoring dan Evaluasi terpadu;**

Kegiatan ini tidak dilaksanakan ditahun 2020 akibat covid 19. Realisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu ditahun 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100 %.

Dengan demikian tingkat capaian indikator kinerja sasaran III (Peningkatan Disiplin, Kesejahteraan ASN dan Fasilitasi KORPRI) ditahun 2020 adalah sebesar **103.01 %** lebih tinggi pencapaiannya jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2019 yang hanya mencapai **89.53 %** dengan kategori **"Sangat Berhasil."**

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di Tahun 2020, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami realokasi/ refokusing anggaran sebanyak 5 kali sehingga banyak target yang telah ditetapkan di awal tahun harus di rasionalisasi kembali sesuai dengan tuntutan kebutuhan strategis di Provinsi NTT. Pencapaian Sasaran Strategis yang dicapai tahun 2020, didukung dengan dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 18.415.436.200,-** dengan rincian (1) belanja tidak langsung sebesar **Rp. 9.032.846.000,-**, dan realisasi mencapai **Rp. 8.449.645.469,-** atau **93.54 %** dan (2).belanja langsung sebesar **Rp. 9.382.590.200,-** dan realisasi mencapai **Rp. 8.388.220.821 -** atau **89.40 %**. Dengan demikian maka total realisasi untuk belanja tidak langsung dan tidak langsung di lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 sebesar **Rp. 16.837.866.290,-** atau **91.43 %**. Sehingga menyebabkan pengembalian ke kas daerah sebesar **Rp. 1.577.569.910,-**. Meskipun demikian secara fisik penyerapan Belanja Tidak langsung maupun Belanja langsung telah dilaksanakan 100%.

**ALOKASI DAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG APBD BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTT TAHUN 2020**

NO	Kegiatan/ Program	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase (%)
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	9.032.846.000	8.449.645.469	93.54
II	BELANJA LANGSUNG (BL)	9.382.590.200	8.388.220.821	89.40
II. A	PROGRAM SKPD	1.749.477.150	1.630.908.940	93.22
1.	Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	787.175.550	711.247.302	90.35
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.000.000	17.690.000	98.27
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	181.200.000	174.199.172	96.13
3	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	-	-	-
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.400.000	4.566.750	84.56
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	63.704.100	63.304.100	99.37
6	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	16.703.870	16.703.870	100
7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	61.370.650	61.370.650	100
8	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	32.496.000	32.496.000	100
9	Penyediaan komponen	4.790.000	4.790.000	100

	instalasi listrik/ penerangan komponen kantor			
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	14.780.000	9.195.000	62.21
11	Penyediaan makan dan minuman	60.960.000	60.890.400	99.88
12	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	-
13	Pemindahan tugas PNS	116.030.000	57.774.160	49.79
14	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000	100.000.000	100
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	911.389.600	868.840.638	95.33
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	161.550.000	158.631.379	98.19
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	605.936.600	571.750.910	94.35
3	Pengadaan Meublair	-	-	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1.100.000	1.100.000	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	80.245.000	80.158.349	99.89
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1.100.000	1.100.000	100
7	Pemeliharaan rutin/	35.215.000	30.100.000	85.47

	berkala peralatan gedung kantor			
8	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan	26.243.000	26.000.000	99.07
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.912.000 ,-	50.821.000	99.82
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.912.000	50.821.000	99.82
III. B	Program pengembangan Kepegawaian dan KORPRI	7.633.113.050	6.757.311.881	88.52
11	Bidang Perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi	3.910.398.200	3.494.451.926	89.36
22	Bidang Pengembangan Pegawai	1.937.415.050	1.701.960.985	87.84
33	Bidang Mutasi Pegawai dan Pensiun Pegawai	790.023.950	682.579.068	86.39
44	Bidang Peningkatan disiplin dan Korpri	995.275.850	878.329.902	88.24
TOTAL BTL DAN BL		18.415.436.200	16.837.875.290	91.43

BAB IV
PENUTUP

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berupaya maksimal dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan maupun dalam memberikan pelayanan prima kepada berbagai pemangku kepentingan walaupun ditengah situasi sulit akibat pandemic Covid-19. Selain itu, meskipun terjadi realokasi anggaran/ refokusing anggaran, BKD tetap konsisten dalam menampilkan kinerja dan prestasi, sebagai bukti Tahun 2020 meraih 5 (lima) buah penghargaan baik itu dari Gubernur NTT mewakili Pemerintah Provinsi NTT dan juga dari Lembaga Independen di pusat.

Tahun 2020 merupakan tahun kedua penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT untuk menjawab RPJMD dan RENSTRA 2018-2023. Hal ini bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban secara terukur dan tranparan atas pelaksanaan rencana kinerja tahun 2020 sesuai dengan regulasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 belum sempurna, oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kebaikan bersama.

Berikut adalah rincian capaian ditahun 2020;

NO	SASARAN	CAPAIAN S/D TAHUN 2020	CAPAIAN TERHADAP IKU	KATEGORI
1	Perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi	120.58	120.58	Sangat berhasil
2	Pengembangan Pegawai	100	100	Sangat berhasil
3	Mutasi pegawai dan Pensiun Pegawai	72.79	72.79	Cukup berhasil

4	Peningkatan Disiplin dan KORPRI	103.01	103.01	Sangat berhasil
RATA-RATA		99.09	99.09	Sangat berhasil

Mengacu pada rencana strategi dan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, terdapat 4 sasaran strategi sebagaimana telah dijabarkan indikator kinerjanya sampai pada hasil/ output terakhirnya. Hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dengan capaiannya. Dari hasil perhitungan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 diperoleh persentase capaian rata-rata sebesar **99.09 %** dan Masuk katagori **SANGAT BERHASIL** dengan daya serap anggaran secara keseluruhan tahun 2020 mencapai **91.43 %** dari Total Belanja Langsung dalam DPPA 2020.

Mengenai keberhasilan, hambatan dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut:

4.1. **Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja**

Dari uraian mengenai pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan yang pada tahun 2020 telah terselenggara dengan sangat berhasil, terbukti dengan tingkat capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai nilai rata-rata **99.09 %** dari target yang ditetapkan sebesar 100% dalam Renstra tahun 2020. Namun ada beberapa indikator yang memiliki realisasi pencapaian kinerja masih turut berkontribusi terhadap menurunnya capaian kinerja tahun 2020/ dibawah target yang ditetapkan yaitu berasal dari sasaran 3; Bidang Mutasi pegawai dan Pensiun Pegawai sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Bab III.

4.2. **Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Sasaran serta langkah antisipatif.**

Dalam pelaksanaan kegiatan dan implementasi kebijakan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi beberapa kendala diantaranya:

1. Pandemic Covid 19 yang menimpa dunia turut berpengaruh pada pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah di rencanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di tahun 2020. Penerapan aturan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSPB) mengakibatkan kegiatan yang harus dilakukan dalam skala besar ditiadakan dan harus menggunakan metode daring. Namun disisi lain, mitra kerja yang tersebar di kabupaten/ kota kita belum memiliki sumber daya yang optimal.
2. Keterbatasan waktu dan anggaran yang disebabkan adanya rasionalisasi/ realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid 19 menyebabkan banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
3. Selain itu terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan secara daring (dalam jaringan) dan masih terkesan baru serta kemampuan Sumber Daya Manusia dalam menggunakan teknologi di kabupaten/Kota se NTT yang kurang optimal menambah sederet masalah dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan ;
4. Terdapat beberapa kegiatan yang bersifat tentative yang menunggu petunjuk pimpinan sebelum dilaksanakan seperti Pelantikan Pejabat Struktural yang semula direncanakan 4 kali kegiatan namun hanya dapat terealisasi sebanyak 3 kali kegiatan.
5. Kurang optimalnya Koordinasi terkait pekerjaan antara pemerintah Kab/ Kota dengan Pemerintah Provinsi NTT yang mengakibatkan terjadinya temuan dilapangan yang mengindikasikan adanya ketidakpahaman terhadap regulasi yang ada maupun kecenderungan untuk mengambil langkah-langkah yang inprosedural.
6. Belum tersinkronnya data base kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dengan kondisi riil ASN;
7. Seleksi yang kompetitiv namun kurang didukung oleh persiapan pra seleksi yang matang sehingga banyak peserta seleksi yang memiliki potensi gagal dalam seleksi awal. Hal ini menyebabkan Pemerintah Provinsi NTT kehilangan 85 formasi CPNS.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Badan kepegawaian Daerah telah berusaha mencari solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, diantaranya dengan:

1. Melakukan realokasi/ refokusing anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung terselenggaranya kegiatan melalui jalur daring/ virtual untuk mempermudah dan mempercepat terselenggaranya pelayanan Kepegawaian di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dan mengusulkan kepada TAPD untuk memperkuat anggaran sesuai dengan substansi kebutuhan maupun perencanaan yang termuat dalam RENSTRA, agar capaian dapat terukur setiap tahun dengan jelas;
2. Kondisi ditengah pandemic Covid 19 bukanlah menjadi penghambat keberhasilan dalam menjalani tugas dan fungsi pemerintahan maupun pelayanan. Merubah strategi penyelenggaraan tugas/pelayanan tatap muka dengan metode sosialisasi secara online/ daring menggunakan beberapa media social yang dimiliki seperti Youtube, Facebook, Instragram, Twitter dan Whats app. Selain itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT juga memiliki Website resmi yang selalu memberikan informasi terkini dan terpercaya bagi semua kalangan masyarakat. Hal ini sangat efektif terbukti Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di tengah pandemic Covid 19 sepanjang tahun 2020 telah berhasil memperoleh 5 sertifikat penghargaan antara lain; (1). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan predikat A, (2). Pencapaian target 100% penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2020 melalui aplikasi Penilaian Prestasi Kerja (PPK) online, (3). Manajemen Mutu ISO 9001:2015 oleh Gubernur NTT, (4). ISO 9001:2015 oleh SZutest selaku lembaga independen Quality management system. (5). Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2020 kategori nilai A.
3. Membangun koordinasi yang berkesinambungan antar instansi pengelola kepegawaian maupun dengan Perangkat Daerah terkait lainnya, baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian tugas secara tepat dalam bidang kepegawaian.

4. Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan melekat secara berjenjang dan konsisten dari pimpinan yang lebih tinggi terhadap PNS yang dipimpinnya, agar dalam setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan dapat menjawab kebijakan yang telah ditetapkan.
5. Memperkuat Tim kerja BKD secara internal maupun pihak terkait secara eksternal agar bekerja sesuai dengan yang ditargetkan dalam Renstra, regulasi dan semangat pelayanan yang tinggi kepada Daerah ini;
6. Pemberian pelayanan tidak saja berpusat di kota, namun diarahkan ke kabupaten-kabupaten yang membutuhkan pelayanan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
7. Perlu dilakukan strategi perencanaan kebutuhan peningkatan kualitas SDM dan penyelenggaraan secara tepat dan berkesinambungan, yang merupakan kolaborasi antara pihak-pihak terkait baik yang ada di Pemerintah provinsi NTT, Pemerintah Pusat, swasta ataupun *stake holder* lainnya, sehingga dapat menghasilkan PNS Provinsi NTT yang berkualitas pula dalam melayani;

Melalui penyusunan LKIP BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para penyelenggara pelayanan maupun pelaksanaan tugas pemerintahan di Lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ataupun bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara lebih komprehensif dalam meningkatkan kualitas kinerjanya yang semakin baik di masa mendatang. Keberhasilan ataupun kegagalan di tahun 2019 menjadi motivasi untuk keberhasilan lebih lanjut serta dasar penentuan kebijakan yang lebih baik guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 15 Januari 2021


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710707 199703 2 008

LAMPIRAN- LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

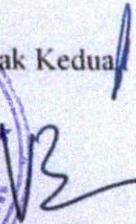
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**
Jabatan : **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


Pihak Pertama,

HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET 2020	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi Pegawai. 2. Proses Administrasi Mutasi Pegawai dan Pensiun Pegawai. 3. Peningkatan Disiplin, Kesejahteraan ASN, dan Fasilitas KORPRI. 4. Pengembangan ASN.	Presentase Formasi Jabatan Sesuai Kualifikasi dan Kompetensi Terlaksananya Lelang Jabatan Terbuka dan Akuntabel untuk Eselon 4,3,2, dan 1 Lingkup Provinsi	30% 50%	100% 100%	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Akuntabel, Transparan, serta Partisipatif	Meningkatnya Birokrasi yang Profesional dengan Karakteristik Adaptif, Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih, dan Bebas KKN	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

**A. APBD
PROGRAM**

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Pengembangan Kepegawaian dan KORPRI

Jumlah

ANGGARAN

Rp. 806.974.550,-
Rp. 875.839.600,-
Rp. 20.000.000,-
Rp. 7.679.776.050,-
Rp. 9.382.590.200,-

**B. APBN
PROGRAM**

-

Jumlah

Rp. -
Rp. -

C. PENDAPATAN

Rp. -

D. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Pencanaan Zona Integritas dari Bulan Januari s/d Maret Tahun 2020
2. Pembangunan Zona Integritas dari Bulan Januari s/d Juni Tahun 2020
3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (75% dari Sisa Temuan)

24 Agustus 2020



RENCANA KINERJA TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			KONDISI AWAL 2019	2020			
1	Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	91.88%	100 %	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Menciptakan Birokrasi yang Profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
		Terlaksananya lelang jabatan Terbuka dan Akuntabel untuk eselon 4,3,2 dan 1 lingkup Provinsi	100 %	100%			

Kupang, 20 Januari 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**



HENDERINA S. LAISKODAT, SP, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710707 199703 2 008

RENCANA AKSI

Nama Unit Kerja/ Instansi : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	INDIKATOR KEGIATAN	RENCANA AKSI				PELAKSANA
				T1 Jan-mrt	T2 Mei- jun	T3 Jul-sep	T4 Okt- des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. RPJMD:								
Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian	1. Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	100%	1. Seleksi CPNS		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi dan pelaksanaan tugas dan kegiatan melalui daring • Mengadakan station CAT mandiri milik Pemprov. NTT 			Bidang Perencanaan, Pendidikan, dan Sistem Informasi
			2. Seleksi Capra IPDN		<ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi dan pelaksanaan tugas dan kegiatan melalui daring. 2) Melakukan kegiatan sosialisasi terkait seleksi sekolah-sekolah kedinasan dengan lebih intens agar bisa mempersiapkan putra-putri NTT dalam mengikuti seleksi kedinasan 3) Membuat video lengkap tentang seluruh tahapan seleksi yang ada pada SPCP IPDN agar memotivasi Calon peserta seleksi untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mempersiapkan diri mengikuti SPCP IPDN tahun 2021 			
	2. Terlaksananya lelang jabatan terbuka dan akuntabel untuk eselon 4,3,2 dan 1	100%	1. Seleksi terbuka bagi JPTP		<ul style="list-style-type: none"> ✓ melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi dan pelaksanaan tugas dan kegiatan melalui daring 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi dan pelaksanaan tugas dan kegiatan melalui daring ✓ Pendaftaran peserta seleksi / lelang terbuka secara online (Agustus- oktober 2020) 		Bidang Pengembangan Pegawai

	lingkup Provinsi						
B. RENSTRA							
1. Perencanaan, Pendidikan, dan Sistem Informasi			1. Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi dan pelaksanaan tugas dan kegiatan melalui daring • Mengadakan station CAT mandiri milik Pemprov. NTT 		
			2. Seleksi Capra IPDN		<ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi dan pelaksanaan tugas dan kegiatan melalui daring. 2) Melakukan kegiatan sosialisasi terkait seleksi sekolah-sekolah kedinasan dengan lebih intens agar bisa mempersiapkan putra-putri NTT dalam mengikuti seleksi kedinasan 3) Membuat video lengkap tentang seluruh tahapan seleksi yang ada pada SPCP IPDN agar memotivasi Calon peserta seleksi untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mempersiapkan diri mengikuti SPCP IPDN tahun 2021 		

			3. Pelaksanaan Sumpah Janji PNS			1. Melakukan kegiatan pengambilan sumpah/ janji PNS secara virtual pada lebih banyak titik lokasi di kab/ kota se NTT utk menghindari penumpukan peserta sumpah janji dalam jumlah besar pada titik lokasi kegiatan.	
			4. Pemutakhiran Data PNS	a. Melakukan penginputan data secara berkala sesuai dengan data/ bukti fisik yang terima sepanjang tahun dari T1-T2 b. sejak bulan Februari dilakukan koneksi data antara SIMPEK dan SAPK di BKN Pusat c. Melakukan pengelolaan, penataan arsip pegawai dan digitalisasi arsip PNS se Provinsi NTT			
2. Pengembangan Pegawai			1. Uji Kompetensi	➤ Pengembangan website Assessment center sebagai pusat informasi dan spesifik tentang penyelenggaraan penilaian kompetensi (<i>ac.bkd.nttprov.go.id</i>) ➤ Pembuatan 18 Video tutorial aplikasi Prestasi Kerja Online			
			3. Lelang Terbuka Jabatan Eselon 4,3,2 dan 1	a. melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi dan pelaksanaan tugas dan kegiatan melalui daring	a. melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi dan pelaksanaan tugas dan kegiatan melalui daring b. Pendaftaran peserta seleksi / lelang terbuka secara online (Agustus- oktober 2020)		

			4. Pelantikan Pejabat Fungsional Tertentu	1. Pembuatan system pendataan ulang jabatan fungsional (SITA-JAFUNG) bagi pejabat fungsional lingkup Provinsi NTT (bit.ly/jafungntt) 2. Sistem pengelolaan administrasi di Sub Bidang Jabatan Fungsional yang terintegrasi antar computer dengan data terpusat (Jabatan fungsional satu data)			
3. Proses Administrasi Mutasi dan Pensiun Pegawai			1. Proses Usulan Kenaikan Pangkat PNS	❖ melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi dan pelaksanaan tugas dan kegiatan melalui daring ❖ Pengumpulan berkas melalui google drive			
			2. Proses Usulan Pensiun Pegawai	1) melakukan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi dan pelaksanaan tugas dan kegiatan melalui daring 2) 14 Mei 2020 mengembangkan aplikasi "Lapor Cepat PNS Meninggal dunia"			
4. Peningkatan Disiplin, Kesejahteraan ASN dan fasilitas KORPRI			1. Proses Penanganan PNS bermasalah			- Sosialisasi Pergub No. 61/2020 ttg Kode etik PNS Lingkup Provinsi NTT secara daring melalui aplikasi zoom meeting dan live pada chanel	

						Youtube BKD Prov. NTT	
			2. Pembinaan Rohani		Pelaksanaan kegiatan ini mulai dilaksanakan secara livestreaming sejak bulan juni s/d desember 2020 akibat dari adanya PSBB		
			3. Kemitraan Penyeleng- gaan HUT KORPRI			Pelaksanaan kegiatan ini mulai dilaksanakan secara livestreaming di bulan desember akibat dari adanya PSBB	

Kupang, 10 Januari 2020


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
HENDERINA S. LAISKODAT, SP. M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197107071997032008

PELAKSANAAN KEGIATAN BKD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI TAHUN 2020

1. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan ini merupakan agenda rutin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT yang dilakukan setiap bulan. Tujuannya adalah untuk memastikan sejauhmana persiapan perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahapan pertanggungjawaban terhadap setiap detail kegiatan yang di lakukan, hambatan – hambatan yang dihadapi serta solusi yang diperlukan dalam menjawab berbagai persolan secara komprehensif. Nampak dalam gambar berikut; Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT; Ibu Henderina S. Laiskodat, SP, M. Si sedang memimpin rapat tersebut yang dihadiri oleh para Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkup Badan Kepegawaian Derah Provinsi NTT.



2. Kegiatan Magang Praja IPDN di Provinsi NTT

Kepala BKD Provinsi NTT menerima 37 Praja IPDN Angkatan XXVIII yang akan melaksanakan magang dan penelitian i Kabupaten/Kota se-NTT, Senin 04 Januari 2021 bertempat di Ruang Rapat BKD Provinsi NTT. Nampak dalam gambar berikut Ibu Kepala BKD Provinsi NTT sedang menandatangani Berita acara serah perima Praja IPDN yang saksi oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan dan Sistem Informasi dan Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri.



3. Assessment Center Provinsi NTT Terakreditasi A

Berdasarkan hasil penilaian akreditasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terhadap kelayakan pelaksanaan uji kompetensi yang menggunakan system Assesmen Center, maka pada tahun 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi berhasil memperoleh nilai Akreditasi A. Persaingan ini cukup ketat karena tidak semua Provinsi berhasil mendapatkan peringkat tersebut. Keberhasilan ini tentu saja tidak terjadi karena upaya kerja keras semalam, namun lebih dari itu komitmen tinggi dan berbagai pihak turut memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan Assessment Center di Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tak hanya sampai di situ, pada tanggal 17 Desember 2020 lalu di ajang bergengsi BKN award 2020, keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin dipertegas dengan memperoleh anugerah penghargaan BKN Award pada Kategori III Penilaian Kompetensi untuk tingkat Provinsi. Dengan berbagai momentum tersebut maka Assessment center Provinsi NTT semakin terkenal di kalangan nasional serta semakin lebih kompetitiv untuk mempertahankan prestasi tersebut. Nampak dalam gambar salah seorang administrator sedang melakukan pengarahan pada kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Akademik dan Umum Universitas Timor di Kefamenanu. Ini merupakan kerja sama pertama dengan pihak vertical dalam menggunakan assessment center Provinsi NTT.



4. Penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS

Selain melakukan proses administrasi kenaikan pangkat Lingkup Provinsi NTT, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT juga memiliki kewenangan untuk memproses usulh kenaikan pangkat PNS di Kabupaten kota se Provinsi NTT untuk kenaikan pangkat Gol. 4c. Nampak dalam gambar berikut Ibu Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun sedang menyerahkan SK Kenaikan Pangkat Golongan IV-C pemerintah kab. TTS



5. Inspeksi Mendadak (Sidak) di Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT

Kegiatan ini merupakan salah satu tugas dan fungsi pokok yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT guna memastikan bahwa tidak ada seorang ASNpun yang lalai melaksanakan tugas karena tidak hadir ke kantor dengan alasan yang tidak jelas. Dan Apabila ditemui dilapangan adanya indikasi pelanggaran terhadap penerapan disiplin, maka akan dilakukan penegakan Sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nampak dalam gambar; Sidak hari pertama di salah satu Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana terdapat barisan ASN yang memadati ruang apel pagi guna mendapatkan motivasi dan arahan pelaksanaan tugas oleh Pimpinan tertinggi di Instansi tersebut.



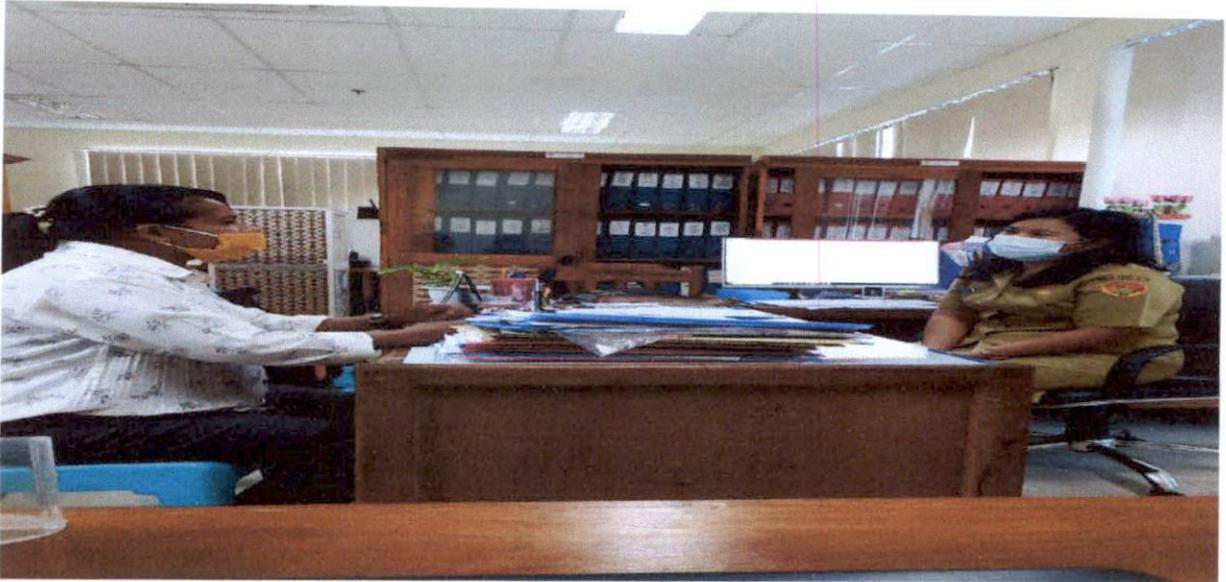
6. Melakukan Konsultasi dan koordinas dengan Perangkat Daerah

Dalam rangka menyukseskan semua pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perubahan regulasi secara cepat dan tepat, maka harus dilakukan berbagai upaya diantaranya dengan menjalin konsultasi dan koordinasi atau kerjasama dengan Instansi teknis sehingga terjalin kesepahaman dalam mengimplentasikan berbagai regulasi tersebut. Nampak Dalam Gambar berikut; (1). Sekretaris BKD Provinsi NTT bersama dengan Para pejabat Struktural di Lingkup BKD Provinsi NTT sedang menghadiri rapat tindak lanjut evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Ranperda yang di tetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 bertempat di Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. (2) Kepala Sub Bagian PDE bersama staf sedang melakukan koordinasi dan konsultasi terkait Reformasi Birokrasi di Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.



7. Pelayanan Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Pegawai

Kasubid Perencanaan dan Formasi Pegawai melayani konsultasi CPNS tentang prosedur perhitungan penyesuaian masa kerja bagi CPNS yang memiliki pengalaman kerja sebelumnya.



8. Pelayanan Sub Bidang Jabatan Struktural

Kasubid Jabatan Struktural menerima dan melayani tamu dari Kabupaten Sumba Barat Daya/Plt. Kepala BKD Sumba Barat Daya dalam rangka konsultasi pengisian JPTP/Administrator/Pengawas Dukcapil.



9. Pelayanan Sub Bidang Jabatan Fungsional

Kasubid Jabatan Fungsional melayani ASN/Tamu dari Dinas Kearsipan yang melakukan konsultasi kenaikan Jabatan Arsiparis



10. Pelayanan Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kompetensi

Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kompetensi memiliki 2 kegiatan besar yang menjadi tupoksi dalam melayani ASN baik itu di Lingkup Provinsi NTT dan juga di 22 Kabupaten kota serta vertikal terkait Uji Kompetensi sebagaimana tampilan dalam gambar berikut;

- a. Melaksanakan kegiatan pendampingan dan pelatihan aplikasi PPK Online bagi PNS pada UPT/Cabang Dinas/Sekolah di Kab. Manggarai Barat, berlangsung di Aula SMK Negeri 1 Labuan Bajo pada Selasa, 08/12/2020.



- b. Tim Assessment Center BKD Provinsi NTT melaksanakan tugas Penilaian Kompetensi Manajerial Pada Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Calon Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu pada tanggal 2-7 Desember 2020.



11. Pra pelaksanaan Kegiatan SLKS Tahun 2020

Rapat Persiapan Kegiatan Penganugerahan SLKS Tahun 2020 hari Jumat 11 Desember 2020 bertempat di ruang rapat BKD Prov.NTT dipimpin langsung oleh Kepala BKD Provinsi NTT; Ibu Henderina S. Laiskodat, SP, M. Si. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk budaya kerja yang selalu dilakukan sebelum kegiatan inti dilaksanakan untuk memastikan semua tahapan kerja telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.



12. Pelaksanaan Budaya Kerja Internal BKD

Rapat pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) Bidang Perencanaan yang langsung dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, pendidikan dan Sistem Informasi; Bapak Fransiskus A. Wotan, S. Sos. Setiap Bidang dan Sekretariat di Lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT menerapkan budaya kerja di unitnya masing-masing.



13. Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pejabat Pelaksana Lingkup BKD Provinsi NTT

Tahun 2020 BKD Provinsi NTT melakukan terobosan besar yaitu Penilaian 360 oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas kepada Pejabat Pelaksana dilaksanakan pada Jumat, 4 Desember 2020 di Ruang CAT Assessment Center BKD Provinsi NTT. Kegiatan ini pertama kali dilakukan di BKD menggunakan fasilitas CAT BKD secara mandiri. Nampak dalam gambar para pejabat Pengawas Lingkup BKD sedang melakukan penilaian menggunakan CAT.



14. Kegiatan Musyawarah Provinsi ke IX KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2020 dengan Tema : Melalui Musyawarah Provinsi Ke IX KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur kita bertekad meningkatkan eksistensi organisasi Korpri sebagai wadah pemersatu ASN guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dilakukan ditengah pandemic covid 19 dengan tetap memperhatikan protab kesehatan yaitu menggunakan masker, jaga jarak dan rajin mencuci tangan/ menggunakan hand sanitizer.



15. Kegiatan Pembinaan Rohani Korpri

berlangsung di BKD Provinsi NTT pada hari Jumat 27 November 2020 dan ditayangkan secara live di Youtube "Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT". Nampak dalam gambar berikut 4 (empat) Rohaniwan yang terdiri dari Rohaniwan Katolik, Rohaniwan Islam, Rohaniwan Hindu dan Rohaniwan Protestan sedang membawakan materi pada sesi waktu yang diberikan.



**ALAMAT WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020**

1. Website : <https://bkd.nttprov.go.id/>
2. Facebook : <https://facebook.com/BkdProvNtt>
3. Instagram : <http://www.instagram.com/bkdprovinsintt>
4. Twitter : <http://twitter.com/Bkdprovinsintt>
5. Youtube : <https://www.youtube.com/c/BadanKepegawaianDaerahProvinsiNTT>



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

Telepon / Fax : (0380) 8430046

Email:kepegawaian@bkd.nttprov.go.id Web Site:www.bkd.nttprov.go.id

LEMBARAN KOREKSI LEVEL 1

Berikut adalah catatan koreksi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT terhadap dokumen LKIP Tahun 2020:

1. Foto-foto, berita, kegiatan BKD NTT selain yang dilampirkan, cantumkan juga di website BKD dan alamat media sosial BKD ; Youtube, Facebook, Instagram dan Tweeter.


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
Henderina S. Laiskodat
HENDERINA S. LAISKODAT, SP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710707 199703 2 008

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai laporan;
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT sebagai laporan
3. Arsip.